

KOMISI PRODUKTIVITAS AUSTRALIA

Memberikan Saran Kebijakan secara Independen kepada Pemerintah

Komisi Produktivitas Australia merupakan badan penasihat pemerintah yang sangat unik dan berpengaruh di Australia.

Bagaimana bisa demikian?



Australian Government

Department of Foreign Affairs and Trade



Knowledge Sector Initiative

MANDAT & PRINSIP KERJA



3 PRINSIP

Komisi Produktivitas, seterusnya disebut Komisi, memberi saran kebijakan secara independen kepada pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat.

INDEPENDENSI

Komisi dilindungi oleh undang-undang yang disahkan oleh parlemen dan tidak dapat dibubarkan kecuali oleh undang-undang baru.

TRANSPARANSI

Isu-isu kebijakan yang menjadi bahan penelitian dibahas dengan melibatkan semua kelompok kepentingan. Masyarakat umum juga diberi ruang untuk memberi umpan balik, seperti melalui website.

KEPENTINGAN SELURUH RAKYAT

Saran kebijakan yang dihasilkan tidak ditentukan kepentingan sempit kelompok tertentu tetapi memperhatikan kepentingan seluruh rakyat.

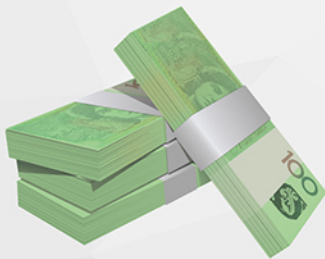
HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH



Komisi melakukan penelitian atas isu kebijakan tertentu berdasar kerangka acuan kerja atau permintaan dari pemerintah.

Pemerintah tidak dapat mempengaruhi hasil akhir penelitian Komisi. Namun, pemerintah juga tidak berkewajiban untuk menggunakan rekomendasi Komisi.

Para komisioner merupakan pegawai negeri sipil yang diseleksi secara transparan dan sesuai kualifikasi. Mereka diangkat untuk periode 5 tahun dan tidak dapat diberhentikan oleh pemerintah, kecuali karena alasan menyimpang.



Sumber anggaran yang dipakai oleh Komisi Produktivitas berasal dari pemerintah.

ASAL-USUL & PERKEMBANGAN

DEWAN TARIF

Komisi bermula dari terbentuknya Dewan Tarif pada 1923. Tujuannya untuk melindungi industri Australia dari persaingan impor, terutama untuk mendorong perkembangan industri manufaktur dan lapangan kerja dalam negeri.

1923



1972

KOMISI BANTUAN INDUSTRI

PM Gough Whitlam pada 1973 tertarik pada gagasan pentingnya pengurangan ketergantungan industri Australia pada tarif. Kendati ditentang partainya, ia mengumumkan pemotongan tarif sebesar 25%. Dewan Tarif dibubarkan dan diganti dengan Komisi Bantuan Industri.

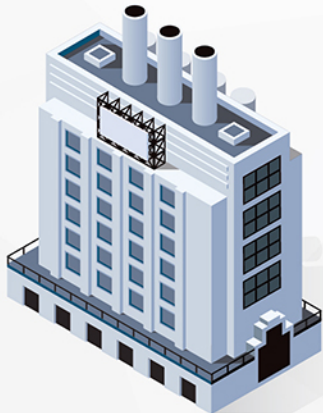


1990

KOMISI INDUSTRI

Setelah berhasil membuat kebijakan pemotongan tarif sampai 1990, Pemerintah melihat perlunya lembaga baru yang dapat memberi saran kebijakan atas isu-isu ekonomi secara luas.

Pada tahun 1990 dibentuklah Komisi Industri dengan menggabungkan Komisi Bantuan Industri dan dua lembaga penasihat lainnya.



1997

KOMISI PRODUKTIVITAS

Pada 1997, Komisi Produktivitas dibentuk melalui penggabungan tiga lembaga, yaitu: Komisi Industri, Komisi Penasihat Perencanaan Ekonomi, dan Biro Ekonomi Industri.

Sesuai namanya, Komisi memberi saran kebijakan yang membuat ekonomi lebih produktif dan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

PENGARUH KEBIJAKAN

Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Komisi sangat berpengaruh pada pengambilan kebijakan dan debat publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh:



Rekomendasi Komisi diadopsi secara langsung oleh pemerintah untuk pengambilan kebijakan. Misalnya, laporan Komisi dipakai untuk perumusan Undang-Undang Cuti Melahirkan bagi Orang Tua (2009) dan program Asuransi Difabel Nasional (2012).



Laporan Komisi juga dipakai dalam kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah serta debat publik melalui media. Misalnya, pada 2012/2013 ada 55 laporan komisi yang dikutip sebanyak 2.145 kali di DPR dan 66 kali di Senat Australia.